

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan secara umum merupakan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa untuk mengurangi bahkan menghapuskan kemiskinan harus dipenuhinya kebutuhan pokok manusia tersebut, dan inilah yang menjadi salah satu tujuan pokok dari pembangunan. (BPS, 2004)

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, namun dari sekian banyak faktor penyebab kemiskinan yang paling penting menurut *World Bank* (2004) adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*Lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*accepable*). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, yang dikategorikan miskin karena tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang umumnya tidak memadai.

Program-program pengentasan kemiskinan sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960, namun karena krisis politik di tahun 1965, program ini sempat terhenti. Di tahun 1970 hingga tahun 2000, meskipun program-program anti kemiskinan kembali dilaksanakan, namun jumlah penduduk miskin relatif tidak berhasil diturunkan. Kondisi ini diperparah lagi

dengan terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997-1998 yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian, yang pada gilirannya angka kemiskinan meningkat tajam. (TKPK, 2002)

Belajar dari pengalaman dalam menuntaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia di tahun 2007 meluncurkan proram-program pengentasan kemiskinan secara simultan dan menyeluruh. Hasilnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dari tahun 2007 sebesar 16,58% menjadi sebesar 11,47% di tahun 2013 (BPS, 2014).

Kondisi penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia ini, diikuti oleh penurunan penduduk miskin baik di level propinsi maupun di level kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di propinsi Sumatera Utara dan di kabupaten Langkat yang merupakan bagian dari wilayah kesatuan negara Republik Indonesia.



Sumber : BPS

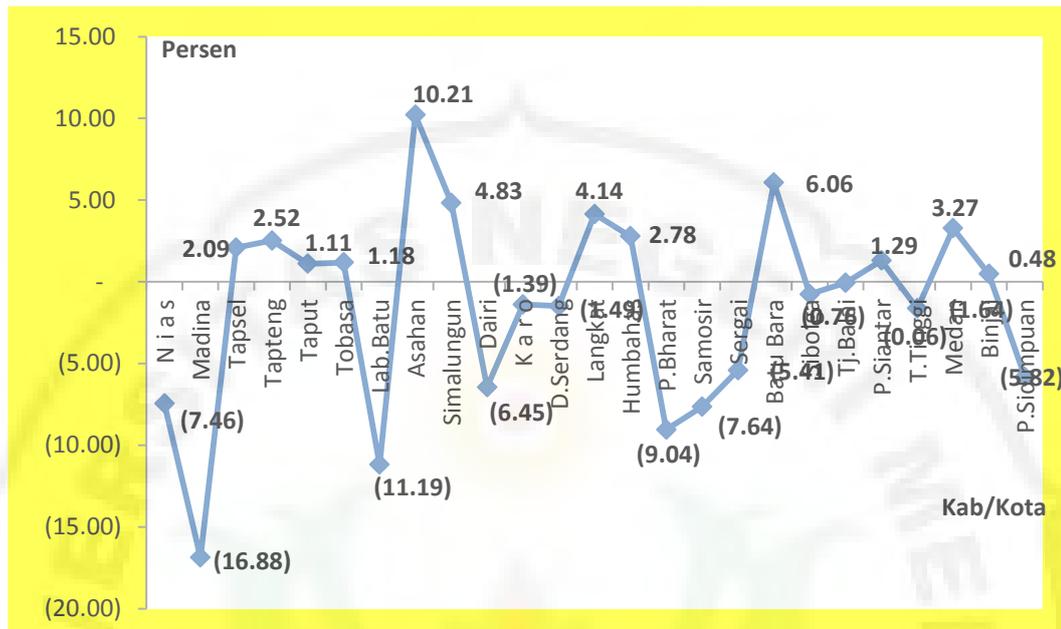
Gambar 1.1. Persentase Kemiskinan di Indonesia, Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat Tahun 2007 – 2013

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2007 yang sebesar 16,58 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 tercatat sebesar 11,47 persen. Kondisi tersebut sama dengan kondisi untuk propinsi Sumatera Utara, dimana di tahun 2007 sebesar 13,90 persen dan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 10,39 persen di tahun 2013.

Berbeda untuk kondisi kabupaten Langkat, dimana di tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 18,23 persen lebih tinggi dari kondisi Sumatera Utara dan Indonesia. Tahun 2008 hingga tahun 2012 persentase penduduk miskin secara signifikan mengalami penurunan, dimana di tahun 2008 sebesar 14,81 persen dan di tahun 2012 sebesar 10,02 persen. Namun di tahun 2013 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin hingga menjadi sebesar 10,44 persen. Namun demikian, kondisi kabupaten Langkat di tahun 2013 menjadi lebih rendah dari kondisi nasional, dan masih lebih tinggi dari kondisi propinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin antara kabupaten/ kota lainnya di seluruh propinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga tahun 2013, terdapat sebanyak 9 kabupaten dan 3 kota yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin selebihnya sebanyak 13 kabupaten/ kota yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin selama tahun 2012-2013.

Untuk lebih terperinci perkembangan persentase penduduk miskin antara kabupaten/ kota di propinsi Sumatera Utara selama tahun 2012-2013 disajikan dalam Gambar 1.2 berikut.



Sumber : BPS

Gambar 1.2. Pertumbuhan Persentase Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013

Dari Gambar 1.2 menjelaskan bahwa pertumbuhan persentase penduduk miskin kabupaten/ kota di propinsi Sumatera Utara tahun 2013 bervariasi, dimana peningkatan penduduk miskin yang terbesar adalah Kabupaten Asahan sebesar 10,21 persen diikuti oleh Kabupaten Batubara sebesar 6,06 persen, Kabupaten Simalungun sebesar 4,83 persen dan Kabupaten Langkat sebesar 4,14 persen serta Kota Medan sebesar 3,27 persen.

Sementara itu penurunan persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 16,88 persen, Kabupaten Labuhan Batu sebesar 11,19 persen, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 9,04 persen dan Kabupaten Samosir sebesar 7,54 persen serta Kabupaten Dairi sebesar 6,45 persen.

Untuk Kabupaten Langkat sendiri, terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin di tahun 2013 disebabkan oleh banyak faktor. Jika ditinjau dari

sisi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan tolok ukur capaian keberhasilan pembangunan daerah mengalami peningkatan di tahun 2013. Oleh sebab itu pihak pemerintah kabupaten Langkat terus melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap program-program anti kemiskinan baik program dari pusat, program dari propinsi Sumatera Utara maupun program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Langkat itu sendiri.

Berdasarkan data BPS (2014), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat di tahun 2007 mencapai 4,91 persen meningkat di tahun 2008 sebesar 5,07 persen. Namun di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi turun menjadi sebesar 5,04 persen. Hingga tahun 2011 pertumbuhan ekonomi meningkat, masing-masing sebesar 5,74 persen di tahun 2010 dan sebesar 5,78 persen di tahun 2011. Tahun 2012 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 5,66 persen. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Langkat kembali meningkat menjadi sebesar 6,05 persen. Secara umum pertumbuhan ekonomi kabupaten Langkat dari tahun 2007 – 2013 menunjukkan peningkatan yang berarti pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Langkat ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi relatif menunjukkan kemajuan.

Dari sisi pencapaian keberhasilan pembangunan lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan ekonomi, Indikator keberhasilan pembangunan jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Langkat di tahun 2007 sebesar 71,50. Hingga tahun 2013 IPM kabupaten Langkat terus menunjukkan pola peningkatan, dimana masing-masing nilai IPM sebesar 72,24 di tahun 2008, sebesar 72,82 di tahun

2009 dan 2010, sebesar 73,62 di tahun 2011, sebesar 73,98 di tahun 2012 dan sebesar 73,98 di tahun 2013. Secara umum IPM kabupaten Langkat juga menunjukkan pola peningkatan.

Secara teori, jika indikator keberhasilan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan, dan sebaliknya jika indikator keberhasilan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pola penurunan maka tingkat kemiskinan akan meningkat (Maipita, 2010)

Jadi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat secara makro, namun lebih detail langsung pada indikator pembentuk variabel itu sendiri. Dalam hal ini, penelitian ini akan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten Langkat propinsi Sumatera Utara di lihat dari sisi pembentuk indikator makro sosial.

Jika dilihat dari data BPS (2014), indikator pembentuk variabel makro sosial diantaranya terdiri dari angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah menunjukkan arah yang positif berarti variabel-variabel makro sosial tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2007 hingga tahun 2013, sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka dan angka buta huruf menunjukkan arah negatif yang berarti terjadi penurunan selama tahun 2007 hingga tahun 2013.

Secara terperinci data-data variabel makro sosial tersebut disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Indikator Makro Sosial Kabupaten Langkat

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Buta Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2007	68.92	3.19	8.70	10.95
2008	68.99	3.19	8.70	9.90
2009	69.03	3.15	8.72	8.77
2010	69.07	3.08	8.76	8.69
2011	69.12	3.04	8.78	5.78
2012	69.16	2.52	8.80	5.98
2013	69.25	2.02	8.82	7.10

Sumber : BPS, 2014

Pada Tabel 1.1 menunjukkan indikator makro sosial kabupaten Langkat selama tahun 2007 – 2013, seperti harapan hidup di tahun 2007 sebesar 68,92 tahun terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi sebesar 69,25 tahun. Angka buta huruf di tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar 3,19 persen menurun terus hingga tahun 2013 menjadi sebesar 2,02 persen. Sementara angka rata-rata lama sekolah di tahun 2007 sebesar 8,70 tahun dan menjadi sebesar 8,82 tahun di tahun 2013. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,95 persen di tahun 2007 hingga tahun 2013 menurun menjadi sebesar 7,10 persen.

Tulisan ini mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dilihat dari sisi makro sosial di kabupaten Langkat, diantaranya adalah tingkat pendidikan yang diukur dengan angka buta huruf dan rata-rata lama sekolah, tingkat kesehatan yang diukur dengan harapan hidup, dan ketenagakerjaan yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah angka harapan hidup , angka buta huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan angka tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah angka harapan hidup , angka buta huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan angka tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan alat evaluasi dalam kerangka penilaian arah pembangunan apakah berperspektif pembangunan *propoor* atau tidak.
2. Sebagai masukan bagi kaum akademisi untuk lebih banyak lagi melakukan kajian dan penelitian tentang kemiskinan di Kabupaten Langkat yang relatif masih jarang dilakukan. Diharapkan dengan semakin banyaknya penelitian akan semakin terbuka informasi dan cara-cara yang efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Langkat.